

PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA PENDIDIKAN DENGAN GOOD GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Imam Hidayat¹⁾
Rosidi²⁾
Erwin Saraswati²⁾

¹⁾Universitas Kaltara Bulungan, Jl. Sengkawit RT.25
Kab. Bulungan, Kalimantan Timur,

²⁾Universitas Brawijaya
Email: hidayat.imam95@yahoo.co.id

Abstract: The Effect of Education Spending to Education Performance with Good Governance as Moderating Variable. This study aims to test empirically the effect of education spending on educational performance using multiple linear regression analysis. The approach used to test the moderating variable with the absolute value of the difference method. Regression testing was performed on 63 samples of both elementary and junior high schools from total population 167 in the district of East Kalimantan Province Bulungan in the period 2011. The results showed that the higher education spending, the more it will improve educational performance. Good governance affects educational performance independently either simultaneously or partially.

Abstrak: Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Kinerja Pendidikan Dengan Good Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan. Penelitian ini merupakan model kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Metode nilai selisih mutlak digunakan untuk menguji variabel moderasi. Pengujian regresi dilakukan pada 63 sampel sekolah SD dan SMP dari populasi 167 di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur periode 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja pendidikan, semakin meningkatkan kinerja pendidikan. Variabel *good governance* juga mempengaruhi kinerja pendidikan secara independen baik secara simultan maupun parsial.

Kata Kunci : Belanja Pendidikan, *good governance*, dan Kinerja Pendidikan

Pemerintah memiliki komitmen besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini tercermin melalui peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total pengeluaran pemerintah akan berdampak meningkatnya belanja pendidikan, sehingga pada akhirnya meningkatkan kinerja pendidikan. Namun demikian, peningkatan kinerja pendidikan tidak cukup hanya meningkatkan alokasi belanja pendidikan, namun diper-

lukan tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja kepada pemilik dana. Semakin baik implementasi *good governance* dalam pengelolaan anggaran pendidikan akan memperkuat pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan (Lewis dan Patterson 2009).

Pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Oleh karena itu, pendidikan formal merupakan investasi produktif dan sangat instrumental dalam menciptakan



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 3
Nomor 2
Halaman 161-331
Malang, Agustus 2012
ISSN 2086-7603

produktivitas penduduk (populasi) suatu negara (Schultz 1971; Sakamotadan Powers 1995; Psacharopoulos dan Woodhall 1997; dalam Olaniyan dan Okemakinde 2011). Modal manusia (*human capital*) sangatlah penting dibandingkan dengan modal material. Pendidikan menjadi kebutuhan publik dan negara menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan pendidikan secara layak sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Peningkatan persentase alokasi anggaran pendidikan terhadap total pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) setiap tahunnya (diakses tanggal 11 April 2012; dan WorldBank 2011.), ternyata belum menunjukkan harapan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini tercermin dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terjadi penurunan peringkat di tahun 1999 dari 102 ke peringkat 124, tahun 2011 dari hampir 190 negara di dunia (UNDP 2000; 2008; 2009; dan 2011). Sejalan dengan itu, prestasi siswa tahun 2007 menunjukkan rata-rata nilai bidang studi matematika berada pada peringkat ke-36 dari 48 negara di dunia dan berada ironisnya masih dibawah negara Asia Tenggara Malaysia dan Thailand (TIMMS 2007), begitu juga di bidang studi ilmu pengetahuan, membaca dan berhitung masih pada peringkat 57 dari 66 negara di tahun 2009 (PISA 2009). Penurunan kualitas kinerja pendidikan terlihat kontras dengan kuantitas kinerja pendidikan dasar saat ini. Berdasarkan indikator angka partisipasi bersih, menunjukkan tingkat partisipasi bersih sekolah dasar (*net enrollment primary*) tahun 2010 sebesar 95%, artinya semakin mendekati target. Begitu pula angka partisipasi bersih SMP (*net enrollment secondary*) sebesar 58% dan 25% sekolah menengah atas semakin meningkat (World Bank 2011). Hal ini menunjukkan peningkatan kuantitas pendidikan belum menyentuh aspek kualitas pendidikan.

Kinerja pendidikan merupakan perwujudan akuntabilitas kepada publik (masyarakat) pengelolaan belanja pendidikan. Anggaran pendidikan dari sumber pemerintah, masyarakat dan dunia usaha menjadi sangat potensial sebagai sumber pembiayaan dalam optimalisasi hasil pendidikan berkualitas. Pengelolaan anggaran pendidikan akan semakin meningkatkan kinerja pendidikan, apabila dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif dengan mekanisme tata kelola yang baik (*good governance*).

good governance merupakan suatu instrumen penting dalam pengendalian keuangan sektor publik tidak terkecuali bidang pendidikan untuk menilai dan memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran sesuai dengan keinginan masyarakat. *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif (Renyowijoyo 2008). Oleh karena itu *good governance* sangat penting dalam pengelolaan belanja pendidikan agar kualitas pendidikan semakin meningkat (Lewis dan Patterson 2009).

Akuntansi memberikan arti penting dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dari lembaga atau organisasi pendidikan. Akuntansi memberikan gambaran secara menyeluruh tentang segala kegiatan dan aktivitas serta operasional dari lembaga atau organisasi pendidikan dari sisi keuangan. Artinya segala aktivitas penyelenggaraan pendidikan yang tidak terlepas dari sisi keuangan merupakan bentuk nyata dari seluruh kegiatan organisasi, termasuk cerminan kinerja dan perkembangan organisasi. Laporan keuangan dan akuntansi adalah urat nadi dari kegiatan dan penyelenggaraan pendidikan. Jadi apabila laporan keuangan kurang sehat, akan mempengaruhi seluruh kegiatan operasional lembaga pendidikan tersebut.

Fenomena permasalahan pendidikan di berbagai negara dunia menarik untuk dikaji. Hasil penelitian pada dua belas negara, menunjukkan belanja pendidikan berpengaruh secara positif terhadap kinerja pendidikan pada enam negara, sedangkan sisanya tidak berpengaruh signifikan (Harbison dan Hanushek 1992). Penelitian lain di beberapa negara juga menemukan pengaruh positif belanja pendidikan terhadap kinerja sekolah dasar dan sekolah menengah (Pritchett 1996). Penelitian lebih spesifik dilakukan di negara-negara miskin seperti Nigeria membuktikan meningkatnya belanja pendidikan, berpengaruh positif terhadap penurunan tingkat buta huruf di negara tersebut (Dauda 2011). Sebaliknya penelitian lain menemukan pengaruh belanja pendidikan terhadap hasil pendidikan cenderung lemah bahkan tidak signifikan (Anand dan Ravallion 1993; Tan dan Mingat 1992; 1998; Hanushek 1995; Pritchett 1996; Wolf 2004; Filmer *et al.* 2000;

Jayasurya dan Wodon 2007).

Hasil penelitian tentang pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan (*education outcomes*) telah dilakukan di Indonesia. Hasil temuan tersebut menunjukkan belanja publik beberapa Propinsi di seluruh Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil-hasil pendidikan, namun belanja pribadi (*private spending*) berpengaruh terhadap tingkat partisipasi sekolah dan kelulusan sekolah. Berdasarkan temuan beberapa penelitian di atas membuktikan bahwa belanja publik tidak mempengaruhi kinerja pendidikan, hal ini disebabkan oleh lemahnya *good governance* pemerintah daerahnya (Suryadarma 2011).

Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional (dalam Mastuhu 2004:18), membuktikan pengaruh belanja pendidikan terhadap rendahnya mutu pendidikan. Hal itu disebabkan faktor tidak transparan, dan tidak efektifnya penyelenggaraan pendidikan. Penelitian di Filipina juga membuktikan lemahnya *good governance* mengakibatkan kebocoran dan ketidakefisienan pembiayaan pendidikan seperti pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, pembelian dan distribusi buku teks, dan perlengkapan sekolah (Leung 2005 dalam Lewis dan Patterson 2009). Penelitian mengenai *good governance* pada enam negara berkembang dengan indikator akun-tabilitas guru seperti tingkat kehadiran guru dalam proses belajar mengajar, ditemukan cukup banyaknya guru di Indonesia tidak hadir tanpa pemberitahuan (tidak mengajar), namun mereka terus rutin menerima gaji mereka (Chaudury *et al.* 2006). Penelitian lain menemukan *good governance* mempengaruhi hubungan belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan di negara-negara dengan *good governance* secara kuat, dan sebagian tidak berpengaruh signifikan pada negara-negara dengan *good governance* lemah (Rajkumar dan Swaroop 2007).

Oleh karena perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu, mendorong peneliti untuk menguji dugaan variabel kontinjensi (*good governance*) akan memperkuat pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan. Teori kontinjensi menjelaskan tidak ada sistem secara universal selalu tepat diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan (Otley 1980). Pendekatan kontinjensi menyebabkan adanya variabel-variabel lain bertindak sebagai variabel *moderating* (Fisher 1995 dalam Suartana 2010:177), dan

menguji kemungkinan interaksi belanja pendidikan dan *good governance* memperkuat atau memperlemah hubungan belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan.

Penelitian ini mereplikasi hasil studi Supriadi (2003) dan Fattah (2004) dengan tujuan menguji pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal obyek, lokasi dan ruang lingkup penelitian, yaitu: *Pertama*, penelitian Supriadi (2003) dan Fattah (2004) dilakukan pada semua level pendidikan baik pendidikan dasar dan menengah, sedangkan penelitian ini difokuskan pada level pendidikan dasar, *Kedua*, penelitian Supriadi, (2003) mengambil lokasi Propinsi di Indonesia dan Fattah (2003) mengambil lokasi di Propinsi Jawa Barat, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur, *Ketiga*, penelitian Supriadi (2003) ruang lingkup belanja pendidikan diperoleh dari sumber dana pemerintah dan pengeluaran pribadi, sementara penelitian Fattah (2003) ruang lingkup belanja pendidikan terbagi kedalam sembilan komponen belanja. Peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian terdahulu dengan ekstensi variabel moderasi *good governance*. Penentuan *good governance* sebagai pemoderasi dikarenakan peningkatan belanja pendidikan dengan semakin kuatnya dorongan *good governance*, akan meningkatkan kinerja pendidikan (Rajkumar dan Swaroop, 2008); Syamsuddin, 2009; Suryadarma 2011).

Pemerintah Kabupaten Bulungan memiliki komitmen besar dalam membangun dan memajukan bidang pendidikan sebagai perwujudan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Hal tersebut telah dituangkan dalam misi yaitu peningkatan mutu pendidikan di daerah dan diwujudkan oleh semakin meningkatkan alokasi belanja pendidikan ke sekolah-sekolah.

Pemerintah Kabupaten Bulungan mengalokasikan Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebesar 17 Miliar rupiah tahun 2012. Meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar 14 Miliar rupiah, begitu juga dengan BOSNAS untuk pendidikan dasar mengalami kenaikan berarti tahun 2012 sebesar kurang lebih 8 Miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar kurang lebih 6 Miliar rupiah (www.kaltimpost.co.id. diunduh 25 Mei 2012). Sementara itu, kinerja pendidikan pada tahun 2011 berdasarkan tingkat kelulusan sekolah dasar sebesar 98,94% dan

sekolah menengah pertama sebesar 99,51 % meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (BPS Kabupaten Bulungan 2012). Adanya komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kinerja pendidikan dengan alokasi belanja pendidikan tersebut menarik untuk diteliti lebih jauh atas kebijakan pemerintah daerah selaku penyelenggara otonomi daerah dalam meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Beberapa penelitian memberikan hasil tidak konsisten terkait dengan belanja pendidikan dan kinerja pendidikan dan perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan, disebabkan adanya dugaan pengaruh variabel *good governance* memperkuat atau memperlemah hubungan kedua variabel tersebut menarik dan memotivasi peneliti untuk menguji *good governance* sebagai variabel memperkuat atau memperlemah pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan khususnya dalam pendidikan dasar.

Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu: pertama, apakah belanja pendidikan berpengaruh terhadap kinerja pendidikan?, kedua, apakah *good governance* memperkuat pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan?

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi berupa: pertama, kontribusi Teori, yaitu hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memahami teori produksi (*input-output*) dan teori agensi (*agency theory*) pada sektor publik atau pendidikan. Kedua, Kontribusi Praktis, yaitu hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggara pendidikan mengenai upaya perbaikan dan pengelolaan anggaran pendidikan. Ketiga, Kontribusi Kebijakan, yaitu hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah pusat dan daerah bahwa kebijakan alokasi belanja pendidikan semakin ditingkatkan tidak hanya pada alokasi belanja pegawai, tetapi alokasi belanja barang dan jasa, dan modal yang bersentuhan langsung dengan proses belajar mengajar.

Fungsi produksi adalah hubungan yang menjelaskan antara *output* dan *input*. Dalam hubungan matematis dijelaskan bahwa produksi merupakan fungsi dari penggunaan berbagai *input* seperti tenaga kerja, modal, material dan teknologi. Makna dalam fungsi produksi yaitu apabila diasumsikan dengan menggunakan *input* modal, berarti

setiap penambahan modal, secara positif akan memberikan dampak sama dalam peningkatan produksi (*output*). Asumsi dari teori produksi tersebut menjelaskan bahwa tanpa *input* tidak dapat berproduksi (*no input no output*), dan semakin banyak *input* digunakan semakin banyak *output* dihasilkan.

Dalam pendekatan teori produksi, biaya atau *cost* dipandang sebagai faktor *input* yang memberi kontribusi pada proses pendidikan dalam membentuk atau mempengaruhi kualitas pendidikan (*output*). Dalam bidang pendidikan, *input* meliputi pengorbanan biaya untuk memperoleh pendidikan, guru dan sumber daya manusia lainnya, kurikulum dan bahan ajar, metode pembelajaran, sementara komponen *output* adalah hasil proses pembelajaran.

Teori agensi menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak pemberi kewenangan (*principal*) kepada penerima wewenang (*agent*) yang diwujudkan dalam bentuk kontrak kerja (*Nexus of Contract*) (Jensen dan Meckling 1976; Lupia dan Cubbins 2000; Scott 2009:284). Konsekuensi delegasi kewenangan atas penggunaan sumber daya, akan berdampak agen lebih banyak memiliki informasi dibandingkan dengan prinsipal, sehingga kemungkinan agen bertindak untuk kepentingan sendiri lebih besar dibandingkan kepentingan prinsipal (*asimetri informasi*). Perbedaan kepentingan mengakibatkan prinsipal mengharuskan agen melaporkan kinerja keuangan, sehingga laporan keuangan menjadi indikator pertanggungjawaban kinerja manajer terhadap penggunaan sumber daya.

Dalam mengawasi perilaku agen dan menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen, prinsipal mewajibkan agen, mempertanggungjawabkan sumber daya yang dipercayakan kepadanya melalui mekanisme pelaporan keuangan (Scott 2009:298). Melalui laporan keuangan prinsipal dapat menilai dan mengawasi kinerja apakah agen telah bertindak untuk kesejahteraan prinsipal.

Sesuai dengan asumsi dalam teori agensi, manajer sekolah dapat memberikan informasi kinerja tidak sesuai dengan realitas sebenarnya, dan ini menjadi masalah dalam hubungan agensi. Kondisi ini mengakibatkan tidak sehatnya tata kelola, karena tidak adanya akuntabilitas dan transparansi memadai untuk mengungkapkan hasil kerjanya secara jujur (Arifin 2005). Teori agensi menganalisis dan mencari solusi atas munculnya permasalahan dalam hubung-

an antara prinsipal dan agen yaitu dengan sistem tata kelola yang baik disebut dengan *good governance*.

Belanja pendidikan sebagai bagian dari proses penganggaran dana publik merupakan kebutuhan operasionalisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan. Belanja didefinisikan sebagai arus keluar dari aset atau segala bentuk penggunaan aset selama periode tertentu atas produksi barang, penyerahan jasa, atau aktivitas yang terjadi dalam kegiatan operasional entitas (Nordriawan *et al.* 2007:187).

Terkait belanja bidang pendidikan, didalamnya selalu berhubungan dengan pengorbanan-pengorbanan secara ekonomis untuk proses produksi dalam menghasilkan kualitas layanan pendidikan. Secara teoritis, konsep biaya dibidang pendidikan mempunyai kesamaan dengan bidang lain, yaitu lembaga pendidikan dipandang sebagai produsen jasa pendidikan untuk menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai seorang lulusan (Fattah, 2004:4).

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara 2005:67 dan Gibson *et al.* 1996:95). Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan ketentuan standar kerja. Kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok (Mangkunegara 2005:15). Dengan demikian kinerja adalah suatu hasil karya seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Kualitas adalah berkaitan dengan hasil mutu kerja, kuantitas adalah jumlah hasil kerja dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian rencana waktu.

Kinerja memiliki makna orientasi pada hasil akhir (*outcomes*) dari sejumlah *input*. Proses pencapaian kinerja (*output/outcomes/benefit*) menurut pemahaman diatas adalah serangkaian kerja *input* (masukan), proses dan akhirnya menjadi *output* (luaran).

Berkaitan dengan kinerja pendidikan, belanja pendidikan memiliki peran penting

untuk pencapaian pada suatu tingkat hasil pendidikan. Kinerja dalam bidang pendidikan secara nyata adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia agar menjadi pelaku-pelaku dalam berbagai bidang kehidupan. Hubungan antara belanja pendidikan dan kualitas pendidikan adalah positif atau saling terkait (Bastian 2006:192).

Kinerja pendidikan dalam berbagai level pendidikan (SD, SMP dan SMA) dipandang dari aspek kuantitas dan kualitas. Dimensi kinerja pendidikan berdasarkan mutu hasil belajar dapat berupa 3 (tiga) dimensi (Sanusi 1994 dalam Bastian 2006b:185) yaitu: pertama, dimensi mutu pengajar, kedua, dimensi bahan ajar, dan ketiga, dimensi hasil belajar.

Pengertian *good governance* menurut *United Nations Development Program* (UNDP, 2000) adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara semua tingkat.

Prinsip-prinsip nilai *good governance* dari beberapa telusuran sekurangnya terdapat empat belas prinsip yang diimplementasikan di Indonesia yaitu : wawasan kedepan (*visionairy*), keterbukaan dan transparansi (*transparency and openness*), partisipasi masyarakat (*participation*), Tanggung gugat (*accountability*), supremasi hukum (*rule of law*), demokrasi (*democracy*), profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*), daya tanggap (*responsiveness*), efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiveness*), desentralisasi (*decentralization*), kemitraan (*partnership*), komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequity*), komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (*commitment to environment protection*), komitmen pada pasar yang fair (*commitment to fair market*) (Bappenas 2007).

Fattah (2004) melakukan penelitian tentang pembiayaan pendidikan di sekolah dasar untuk mengetahui korelasi dan pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu proses belajar mengajar, dan mutu prestasi belajar siswa sekolah-sekolah di Kabupaten Bandung yang berjumlah 232 sekolah. Hasil penelitian membuktikan secara parsial belanja gaji dan kesejahteraan pegawai, pembiayaan guru, pengadaan bahan pelajaran, perawatan, sarana kelas, sarana sekolah, pembinaan siswa dan pengelolaan sekolah berpengaruh signifikan terhadap proses dan mutu belajar.

Supriadi (2003) meneliti korelasi biaya pendidikan dengan mutu pendidikan berdasarkan nilai UN pada jenjang SD, SLTP, SMU dan SMK negeri 6 propinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Bali dan Kalimantan Barat), dan membuktikan korelasi positif dan kuat biaya pendidikan dengan prestasi belajar siswa.

Suryadarma (2011) menguji pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan di Kabupaten dan Kota Indonesia, dan hasilnya membuktikan pengeluaran pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pendidikan, namun belanja pribadi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendidikan-an. Penelitian ini juga membuktikan bahwa faktor penyebab yang mempengaruhi hubungan belanja pendidikan dan kinerja pendidikan adalah tingkat tata kelola pemerintahan (indeks persepsi korupsi).

Syamsudin (2009) menguji pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu hasil belajar melalui mutu proses belajar mengajar pada sekolah menengah pertama di Kabupaten Asahan. Dengan menggunakan analisis jalur penelitian tersebut membuktikan bahwa biaya pendidikan berpengaruh negatif terhadap mutu hasil belajar, namun pengaruh biaya pendidikan berpengaruh positif terhadap mutu hasil belajar melalui perantara mutu proses belajar mengajar.

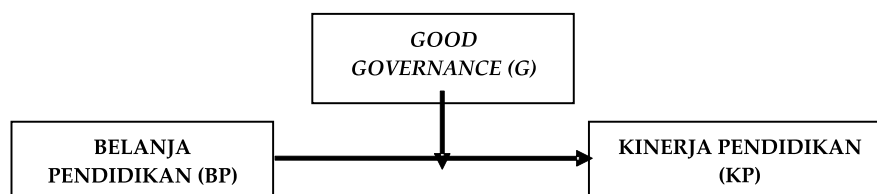
Rajkumar dan Swaroop (2007) menguji hubungan antara belanja pendidikan dan *good governance* terhadap hasil-hasil pendidikan (*outcomes education*). Hasil penelitian tersebut membuktikan hubungan signifikan dipengaruhi *Governance* (kualitas birokrasi dan indeks korupsi). Hasil perbandingan di beberapa negara menunjukkan belanja pendidikan mempengaruhi kinerja pendidikan beberapa negara di Asia Timur (Jepang, Korea Selatan) dengan pengaruh tata kelola yang baik (*Governance*) di negara tersebut.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Belanja pendidikan dan hasil pendidikan mempunyai hubungan secara langsung. Belanja pendidikan memberikan pengaruh positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan, untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan (Johns, *et al* 1983, dalam Fattah 2004:108). Belanja pendidikan dipergunakan untuk penyediaan *input* akan memberikan dampak pada kinerja pendidikan melalui fungsi alokasi yang tepat (*effective*), adil (*equitable*), dan efisien. Belanja pendidikan dengan kinerja pendidikan merupakan sebuah fungsi, dan belanja merupakan salah satu faktor penentu tidak terhindarkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar (Barle, 1995; Sallis, 1993 dalam Fattah, 2004:108). Dengan demikian dugaan pertama penelitian adalah belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan.

Hubungan belanja pendidikan dengan pencapaian hasil pendidikan dasar dipengaruhi oleh kuatnya *good governance* (Reinikka dan Svensson 2004; Rajkumar dan Swaroop 2007; Suryadarma 2011). Beberapa penelitian tentang lemah dan tidak signifikannya pengaruh belanja pendidikan terhadap hasil pendidikan telah dibuktikan oleh faktor lemahnya *good governance* di sekolah (Pritchett 1996; Mauro 1997; Gupta *et al.*, 2000; Azfar dan Gurgur 2001; Chapman 2002; Bjorkman 2006; Chaudury *et al.*, 2006; Rajkumar dan Swaroop 2007).

Semakin baik mekanisme *good governance* diterapkan dalam suatu organisasi, semakin tinggi efektivitas dan efisiensi penggunaan *input* dalam mencapai kinerja organisasi, sebaliknya jika *good governance* tidak diimplementasikan atau setengah-setengah hanya untuk memenuhi regulasi dan tidak dilandasi etika profesionalitas sungguh-sungguh, maka efektivitas dan efisiensi biaya akan tidak tepat sasaran dan menyebabkan terjadinya kebocoran anggaran serta berdampak pada tidak tercapainya atau kecilnya pencapaian kinerja. Dengan demikian



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

dugaan penelitian yang kedua adalah semakin tinggi *good governance*, semakin memperkuat pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan.

METODE

Unit analisis dalam penelitian ini adalah sekolah baik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Populasi penelitian adalah seluruh satuan pendidikan dasar baik Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Negeri (SLTPN) di Kabupaten Bulungan, yang berjumlah 167 sekolah, terbagi 125 SD dan SMP 42 sekolah.

Penelitian ini menggunakan metode sampel berstrata (*Stratified Sampling*) secara proporsional berdasarkan rumus Slovin (Riduan dan Akdon, 2009:254), sebanyak 63 sekolah, pengambilan sampel dilakukan dengan *proporsional stratified*. Jumlah sampel pada SD 47 dan SMP 16.

Data primer dan sekunder diperoleh dengan mendatangi sekolah-sekolah dan menyerahkan langsung kuisioner kepada kepala sekolah sebagai responden.

Belanja Pendidikan (BP) dalam penelitian ini adalah total belanja (pengeluaran) untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, teranggarkan dalam RAPBS/RAKS pada tahun 2011 bersumber dari APBN dan APBD.

Kinerja Pendidikan (KP) adalah hasil akhir rata-rata nilai ujian nasional (UN) siswa pada bidang pelajaran utama seperti Matematika, Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk SD; Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk SMP pada tahun 2011.

Good governance (G) adalah sistem penatalaksanaan pendidikan yang menggambarkan komitmen, standar, proses, dan alat untuk mengukur standar pelayanan pendidikan dan kinerja pendidikan, berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, standar pelayanan pendidikan, sistem informasi manajemen, sistem pengendalian manajemen, dan efisiensi penggunaan sumber daya. *Good governance* dalam penelitian ini diukur dengan mengadopsi elemen kunci pengukuran dari survey *The Indonesia Local Education Governance Index (ILEGI)* dengan dimensi utama yaitu: Transparansi dan Akuntabilitas (*Transparency and Accountabi-*

lity), Standarisasi Layanan Pendidikan (*Education Service Provision Standards*), Sistem Pengendalian Manajemen (*Management Control System*), Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System*), dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Efficient Resource Use*)

Hasil pengukuran *good governance* dalam penelitian ini adalah nilai indeks dihitung dengan pendekatan *weighted approach*, yaitu dengan memberikan bobot tertimbang pada masing-masing item.

Metode analisis dalam penelitian ini dengan analisis deskriptif, pengujian kualitas data (validitas dan reliabilitas), asumsi klasik dan analisis utama dengan regresi berganda serta metode pengujian dugaan yang akan digunakan.

Analisis data dengan model regresi linear berganda dengan pendekatan nilai selisih mutlak Frucot dan Shearon (1991) dalam Ghazali (2011:209).

Parameter-parameter pengukuran dari regresi ini dengan menggunakan bantuan perhitungan program SPSS 17.0. Model analisis regresi linear dengan pendekatan Baron dan Kenney (1986) dalam Hartono (2007:143); (2011:101) dapat digambarkan dalam tiga model persamaan sebagai berikut:

$$KP = a + \beta_1 BP + e \dots\dots\dots(1)$$

$$KP = a + \beta_1 BP + \beta_2 G + e \dots\dots\dots(2)$$

$$KP = a + \beta_1 BP + \beta_2 G + \beta_3 |BP - G| + e \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

- KP : Kinerja Pendidikan
- BP : Belanja Pendidikan
- G : *Good governance*
- a : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
- $|BP - G|$: Interaksi nilai selisih mutlak antara Belanja Pendidikan (BP) dan *good governance* (G) yang telah *distandardized*.

Apabila efek interaksi $\beta_3 \neq 0$, dan $\beta_2 \neq 0$, maka variabel *good governance* tergolong kedalam variabel moderator, namun apabila $\beta_3 = 0$, tetapi $\beta_2 \neq 0$ maka variabel *good governance* tidak tergolong kedalam variabel moderator tetapi tergolong kedalam variabel independen (Ghozali 2009:204).

Penelitian ini dengan menggunakan Koefisien Determinasi, uji F (uji signifikansi simultan) dan uji t (uji signifikansi parameter individual) (Ghozali (2011:213-214)). Pengujian parameter dengan menggunakan taraf signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji instrumen dalam penelitian ini hanya variabel *good governance*, variabel-variabel lain tidak menggunakan kuisioner, untuk itu perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam meningkatkan validitas eksternal, terdapat beberapa prosedur dilakukan oleh peneliti, *Pertama*, instrumen penelitian ini terlebih dahulu diujicobakan pada 15 (lima belas) di SD dan SMP Kota Malang, *Kedua*, peneliti menyerahkan langsung kuisioner kepada kepala sekolah dan meminta langsung untuk mengisikannya serta melakukan verifikasi atas jawaban responden.

Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa dari ke 31 item pertanyaan indikator variabel *good governance* (G), tersisa 27 item memenuhi kelayakan dalam mengukur variabel *good governance*.

Sebelum dianalisis dan diuji, data harus memenuhi persyaratan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan hasil uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas telah memenuhi kaidah yang ditetapkan.

Pengujian efek moderasi dalam regresi linear dapat dilakukan secara bertahap menggunakan pendekatan Baron dan Kenney (1986), yaitu menguji efek utama (pengaruh independen terhadap dependen) harus signifikan, kemudian menguji pengaruh variabel moderasi terhadap dependen yang harus signifikan, dan kemudian pengaruh interaksi variabel interaksi dan variabel moderator harus signifikan (Hartono 2011:101).

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,129, artinya 12,9% variabel kinerja pendidikan dapat dijelaskan oleh variabel belanja pendidikan, sisanya sebesar 87,1% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian.

Uji *Goodness of fit* suatu model menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 12,496 > F_{tabel} sebesar 8,49. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model ini dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan.

Berdasarkan uji t didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 3,592 > t_{tabel} sebesar 1,6702, artinya bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan.

Dugaan penelitian kedua yaitu pengaruh *good governance* memoderasi pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 2.

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 < (ρ value = 0,05). Hal ini berarti bahwa variabel belanja pendidikan dan *good governance* secara simultan mempengaruhi kinerja pendidikan. Pengujian secara parsial pengaruh belanja pendidikan dan *good governance* terhadap kinerja pendidikan menunjukkan nilai probabilitas masing-masing variabel (0,017 dan 0,000) < (ρ value = 0,05). Hasil ini menjelaskan bahwa belanja pendidikan dan *good governance* secara parsial mempengaruhi kinerja pendidikan. Berdasarkan pengujian secara parsial (t_{hitung}) diperoleh informasi bahwa belanja pendidikan dan *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan.

Nilai koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,271, artinya belanja pendidikan dan *good governance* mempengaruhi kinerja pendidikan sebesar 27,1 %, sisanya 72,9 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model.

Berdasarkan pada kedua efek sebelumnya, maka pengujian *good governance* sebagai variabel moderasi akan memperkuat pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan dapat dilakukan, dengan melihat adanya efek interaksi belanja pendidikan dengan *good governance* ($|BP-G|$) terhadap

Tabel 1: Rekapitulasi Hasil Pengujian Belanja Pendidikan Terhadap Kinerja Pendidikan

Model Persamaan : $KP = 0,902 + 0,104 BP + e$			
Variabel	Hipotesis		t value (Sig)
Konstanta	-	0,902	-
BP	H ₁	0,104	3,592*
R² = 0,129		F hitung = 12,496*	

Keterangan :
 * Signifikan pada taraf 5% one tailed test; t tabel (df : 61) = 1,6702
 F tabel (df1 : 1; df2 : 60) = 8,49

Sumber: Data Diolah 2012.

Tabel 2: Rekapitulasi Hasil Pengujian Efek Variabel *good governance* (Variabel Moderasi) Terhadap Kinerja Pendidikan

Model Persamaan : $KP = 0,324 + 0,079 BP + 0,257 G + e$			
Variabel	Hipotesis	Koefisien (β)	t value (Sig)
Konstanta	-	0,324	-
BP	-	0,079	2,454 (0,017)*
G	-	0,257	3,740 (0,000)*
Adjusted R² = 0,271		F hitung = 12,496 (0,000)*	
Keterangan :			
* Signifikan pada taraf 5%			

Sumber: Data Diolah 2012.

kinerja pendidikan, sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.

Berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan hasil pengujian secara simultan dan parsial belanja pendidikan, *good governance* dan interaksi belanja pendidikan dan *good governance* ($|BP-G|$) terhadap kinerja pendidikan. Nilai probabilitas dalam pengujian secara simultan sebesar $0,000 < (\rho \text{ value} = 0,05)$. Dengan demikian model ini dapat digunakan untuk memprediksi kinerja pendidikan. Hal ini berarti secara simultan belanja pendidikan, *good governance* dan interaksi belanja pendidikan dan *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pendidikan.

Pengujian secara parsial pada variabel bebas terhadap variabel terikat, menunjukkan nilai probabilitas belanja pendidikan ($0,008$) dan *good governance* ($0,000 < (\rho \text{ value} = 0,05)$), dan interaksi belanja pendidikan dan *good governance* ($0,265 > (\rho \text{ value} = 0,05)$). Hal ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan *good governance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendidikan, namun interaksi belanja pendidikan dan *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendidikan. Berdasarkan uji di atas menunjukkan variabel belanja pendidikan dan *good governance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendidikan, sedangkan interaksi

antara belanja pendidikan dengan *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendidikan.

Nilai koefisien determinasi menunjukkan nilai $0,327$; artinya bahwa kinerja pendidikan dipengaruhi oleh belanja pendidikan, *good governance* dan interaksi belanja pendidikan dan *good governance* sebesar $32,7\%$ sisanya $67,3\%$ ditentukan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model.

Dengan melakukan analisis terhadap hasil pengujian ketiga persamaan tersebut, maka dalam tabel 4 dapat diringkas perubahan parameter dari satu persamaan ke persamaan lain.

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa *good governance* bukan sebagai variabel memperkuat atau memperlemah pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan, hal ini dibuktikan dengan uji variabel *good governance* (β_3) pada persamaan kedua yang signifikan (sebelum ada interaksi), tetapi pada persamaan ketiga variabel *good governance* (β_3) tidak signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa *good governance* bukan sebagai variabel moderasi tetapi sebagai variabel independen. Nilai koefisien regresi interaksi belanja pendidikan dan *good governance* yang negatif justru menurunkan kinerja pendidikan. *Good governance* tidak dikasikan bukan sebagai variabel moderasi

Tabel 3: Rekapitulasi Hasil Pengujian Efek Interaksi Belanja Pendidikan dan *good governance* ($|BP-G|$) Terhadap Kinerja Pendidikan

Model Persamaan : $KP = 3,064 + 0,048 BP + 0,069 G - 0,026 BP-G + e$			
Variabel	Hipotesis	Koefisien (β)	t value (Sig)
Konstanta	-	3,064	-
BP	-	0,048	2,760 (0,008)*
G	-	0,069	3,970 (0,000)*
$ BP-G $	H₂	- 0,026	-1,125 (0,265)
Adjusted R² = 0,327		F hitung = 11,064 (0,000)*	
Keterangan :			
* Signifikan pada taraf 5%			

Sumber: Data Diolah 2012

Tabel 4: Perubahan Parameter Antar Persamaan

Persamaan	Hasil Pengujian (β)	Shift R ²	Keterangan
Pertama	$\beta_1 \neq 0$	12,9	BP sig.
Kedua	$\beta_1 \neq 0; \beta_2 \neq 0$	27,1	BP dan G sig.
Ketiga	$\beta_1 \neq 0; \beta_2 \neq 0; \beta_3 = 0$	32,7	BP, G sig., BP-G tidak sig.

Sumber : Tabel 1,2 dan 3.

tetapi lebih kepada variabel bebas berdiri sendiri, diperkuat oleh semakin meningkatnya nilai koefisien determinasi. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya dominasi variabel *good governance* sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Beta yang semakin besar dari persamaan 2 ke persamaan 3.

Belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan disebabkan oleh pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan alokasi belanja pendidikan minimal 20% dari pengeluaran pemerintah. Hal ini berdampak nyata pada meningkatnya pembiayaan pendidikan semakin besar, artinya sekolah semakin memiliki kemampuan lebih tinggi dalam memenuhi pengeluaran atau biaya dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Kedua, konsekuensi sekolah telah mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja berdampak pada sekolah semakin efektif dan efisien serta ekonomis mengelola sumber daya anggaran, meskipun satuan pendidikan menerima alokasi belanja berbeda-beda jumlahnya, khususnya dalam komponen belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang alokasinya tidak sebesar Belanja Pegawai. Ketiga, akuntabilitas semakin besar dari penyelenggara pendidikan (guru) kepada masyarakat sebagai konsekuensi belanja pegawai semakin dominan, tuntutan akuntabilitas profesi guru agar semakin meningkatkan profesionalitasnya dalam meningkatkan kinerja.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Supriadi, (2003) dan Fattah (2004) membuktikan belanja pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendidikan. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian Syarifuddin (2009), dan Suryadarma (2011) yang membuktikan bahwa belanja pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil-hasil pendidikan. Perbedaan ini disebabkan oleh obyek penelitian, faktor kontekstual dan wilayah berbeda. Penelitian Suryadarma (2011) mengambil obyek penelitian seluruh level pendidikan (baik SD, SMP

dan SMA) seluruh propinsi di Indonesia baik negeri, swasta, dan madrasah. Begitu juga sumber belanja pendidikan dalam penelitian Suryadarma (2011) tidak hanya bersumber dari pemerintah tetapi juga berasal dari pengeluaran pribadi (*private spending*). Penelitian Syamsuddin (2009) mengambil obyek penelitian hanya pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *good governance* tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa *good governance* bukan sebagai variabel pemoderasi, namun sebagai variabel bebas berdiri sendiri. Oleh karena itu dapat diartikan peningkatan belanja pendidikan disertai dengan peningkatan *good governance*, maka tidak semakin meningkatkan ketercapaian kinerja pendidikan, tetapi secara individual *good governance* mempengaruhi kinerja pendidikan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *good governance* berdiri sendiri (*independent*) lebih berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendidikan dibandingkan dengan setelah belanja pendidikan berinteraksi dengan *good governance*. Realitas menunjukkan sekolah telah memiliki sarana dan sistem pendukung implementasi *good governance* seperti peraturan dan proses (manajemen sekolah) dan tolok ukur kinerja, namun pada saat diaplikasikan untuk pengelolaan dana pendidikan ada ketidakmampuan dan ketidakpercayaan dari sekolah. Ketidakmampuan sekolah dalam hal ini disebabkan lemahnya kemampuan manajerial dengan tidak didukung tingkat pendidikan dan kompetensi memadai khususnya sekolah di pedesaan. Kemungkinan sekolah masih enggan menggunakan media atau ruang publik dalam merealisasikan rencana dan program pendidikan meskipun sudah tersedia disekolah. Ketidakpercayaan sekolah dalam mengelola belanja pendidikan, karena manajemen publik masih menganggap untuk meningkatkan kinerja pendidikan hanya

dapat dilakukan dengan meningkatkan belanja pendidikan dan tidak adanya keinginan kuat untuk melaksanakannya. Artinya sarana untuk *good governance* mungkin hanya sekedar retorika dan untuk membuat citra sekolah seolah-olah menjadi baik dan sebenarnya untuk mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah dan untuk menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan di sekolah tersebut.

Berdasarkan hasil deskriptif *good governance*, seluruh elemen *good governance* seperti akuntabilitas dan transparansi, standar pelayanan, sistem pengendalian manajemen, sistem informasi manajemen, dan efisiensi sumber daya menunjukkan seluruh sekolah telah melakukan pengungkapan implementasi tata kelola yang baik. Namun implementasi *good governance* disekolah tereduksi, pada akhirnya belum optimal mempengaruhi kinerja pendidikan. Kemungkinan alokasi belanja pendidikan lebih didominasi oleh belanja pegawai (90%) dan relatif kecilnya belanja barang dan jasa, dan belanja modal (kurang lebih 10%) tidak memberikan dampak cukup berarti terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Dalam sektor ini ada kesulitan untuk mengukur kinerja guru, sehingga kinerja guru hanya dapat dilihat dari tingkat kehadiran dalam mengajar. Hal ini berdampak pada penatakelolaan relatif sulit dalam untuk melihat peningkatan kinerja guru, terlebih mereka yang masih berada di daerah terpencil. Tingkat pendidikan dan kompetensi guru masih rendah, serta rendahnya kemampuan manajerial kepala sekolah dalam pengelolaan belanja pendidikan juga ikut mempengaruhi rendahnya kinerja guru. Determinasi *good governance* tidak berdampak pada peningkatan belanja pendidikan dalam mempengaruhi kinerja pendidikan, disebabkan juga oleh kecilnya peranan belanja pendidikan dalam menentukan kinerja pendidikan.

Meskipun *good governance* bukan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan, tetapi sebagai variabel independen. Variabel *good governance* bukanlah sebagai faktor cukup kuat menentukan terhadap keberhasilan kinerja pendidikan. Hal ini disebabkan peran yang diberikan masih relatif kecil, dan masih dimungkinkan faktor lain berpengaruh terhadap hubungan belanja pendidikan dan kinerja pendidikan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung

penelitian Pritchett (1996); Mauro (1997); Gupta *et al.* (2000); Azfar dan Gurgur (2001); Chapman (2002); Bjorkman (2006); Chaudury *et al.* (2006); Rajkumar dan Swaroop (2007); Lewis dan Patterson, (2007); Reinikka dan Svensson (2004); dan Suryadarma (2011) membuktikan bahwa *good governance* memoderasi belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan baik dasar dan menengah di beberapa negara. Hal ini disebabkan perbedaan pengukuran pada indikator *good governance* tidak menggunakan indeks persepsi korupsi (IPK), tetapi menggunakan indikator-indikator dari pengukuran Indeks Tata Kelola Pendidikan Daerah Indonesia (*The Indonesian Local Education Governance Indeks*).

SIMPULAN

Hasil pengujian pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan menunjukkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan. Artinya bahwa apabila alokasi belanja pendidikan ditingkatkan, maka akan berdampak pada peningkatan kinerja pendidikan.

Hasil pengujian pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan dengan *good governance* sebagai variabel moderasi menunjukkan bahwa *good governance* tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan. Hal ini berarti bahwa *good governance* bukan sebagai variabel moderasi, namun sebagai variabel independen. Belanja pendidikan dan *good governance* tidak berinteraksi dalam mempengaruhi kinerja pendidikan tetapi belanja pendidikan dan *good governance* secara individual dan simultan mempengaruhi kinerja pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anand, S. dan M. Ravallion. 1993. "Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services". *Journal of Economic Perspectives*, 7(1): 133-150
- Arifin, 2005. *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*, Disampaikan Pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

- Azfar, O. dan T. Gurgur. 2004. "Does Corruption Affect Health and Education Outcomes in the Philippines". *The IRIS Discussion Papers on Institutions and Development*.
- Bappenas. 2007. *Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional, BAPPENAS, Jakarta.
- Bastian, I. 2006a. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bastian, I. 2006b. *Akuntansi Pendidikan*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bjorkman, M. 200. Does Money Matter for Student Performance? Evidence from a Grant Program in Uganda, *IGIER Working Paper No. 326*. Milan: Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research, Università Bocconi.
- Chapman, D. 2002. *Corruption and the Education Sector*, Washington DC: Management Systems International.
- Chaudhury, N. Jeffrey H., M. Kremer, K. Muralidharan, dan F.H. Rogers. 2006. Missing in Action: Teacher and Health Worker Absence in Developing Countries, *Journal of Economic Perspectives*, 20(1): 91-116.
- Dauda, R.O.S. 2011. "Effect of Public Educational Spending and Macroeconomic Uncertainty on Schooling Outcomes, Evidence From Nigeria". *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*.
- Fattah, N. 1999. "Analisis Hubungan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Dengan Mutu dan Proses Belajar". *Jurnal Mimbar Pendidikan*, No. 3/XVIII/1999.
- Fattah, N. 2004. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Filmer, D. 2000. The Structure of Social Disparities in Education, *World Bank Policy Research Working Paper No. 2268*, Washington, D.C.: World Bank.
- Gallagher, M. 1993. A Public Choice Theory of Budgets : Implications for Education in Less Developed Countries, *Comparative Education Review* 37, hal. 90-106.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 3. Penerbit LPFE-Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, I. 2011. *Ekonometrika, Teori, Konsep dan Aplikasi Dengan SPSS 17*, Penerbit BPFE-UNDIP, Semarang.
- Gibson, J., L. Ivancevich, John, M. dan D, James. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses*. Terjemahan. Jilid 1. Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
- Gupta, S., Verhoeven, M., Tiongson T. (1999). Does Higher Government Spending Buy Better Results In Education And Health Care?, *Working Paper 99/21. International Monetary Fund*, Washington, DC.
- Hanushek, E. 1995. Interpreting Recent Research on Schooling in Developing Countries, *The World Bank Research Observer* 10 (2). 227-246.
- Harbison, R. dan E. Hanushek. 1992. *Educational Performance of the Poor : Lessons from Rural Northeast Brazil*, Washington DC : Oxford University Press.
- Hartono, M.J. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Penerbit BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Hartono, M.J. 2011. *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modelling Berbasis Varian Dalam Penelitian*, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Jayasurya, R. dan Wodon, Q. 2007. "Efficiency In Improving Health And Education Outcomes: Provincial And State-Level Estimates For Argentina And Mexico". *Estudios Economicos* 22 (No. 1), 57-97.
- Jensen M.C. dan W.H. Meckling. 1976. "Agency Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, 3 (4), hal.305-360.
- Krina.L.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance, Bappenas, Jakarta.
- Lewis, M. dan G. Pattersson. 2009. Governance in Education : Raising Performance, diunduh Maret 2012.
- Lupia, A. dan M.M.Cubbins. 2000. Representation or Abdication? How Citizens Use Institutions to Help Delegation Succeed, *European Journal of Political Research* 37: 291-307.
- Mangkunegara, A.P. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mastuhu. 2004. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Penerbit Safiria Insani Press dan MSI UII, Yogyakarta.
- Mauro, P. 1998. "Corruption And The Composition Of Government Expenditure".

- Journal of Public Economics*, 69(2): 263-279.
- Nordiawan, D., Iswahyudi S.P., dan Maulidah R. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Olaniyan, D.A. dan Okemakinde, T. 2008. Human Capital Theory : Implication for Education Development, *European Journal of Scientific Research*.
- Osborne, D. dan Gaebler, T. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*, Penguin Book, New York.
- Otley, D.T. 1980. The Contingency Theory of Management Accounting : Achievement and Prognosis, *Accounting Organization and Societ*, 5 (4) : 413-428.
- PISA. 2009. *PISA 2009 Result : What Student Know and Can Do*, Published OECD 2010.
- Pritchett, L. 1996. "Mind Your P's And Q's: The Cost Of Public Investment Is Not The Value Of Public Capital". *Policy Research Working Paper 1660. Development Economics Research Group*, World Bank, Washington, D.C.
- Psacharopoulos, G. 1987. *Economics of education reseach and studies*. Oxpord: Pergamon Press.
- Rajkumar, A.S. and V. Swaroop. 2008. "Public Spending and Outcomes: Does Governance Matter?". *Journal of Development Economics*, 86(1): 91-111.
- Reinikka, R. dan J. Svensson. 2004. "Local Capture: Evidence from a Central Government Transfer Program in Uganda". *Quarterly Journal of Economics*, 119(2): 679-705.
- Renyowijoyo.M. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Riduan dan Akdon. 2009. *Rumus Dan Data Dalam Analisis Statistika Untuk Penelitian : (Administrasi Pendidikan, Bisnis, Pemerintahan, Sosial, Kebijakan, Ekonomi, Hukum, Manajemen, Kesehatan)*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Saraswati, E. 2011. *Dampak Efisiensi Belanja Publik Terhadap Kesejahteraan (Welfare)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Scott, W.R. 2009. *Financial Accounting Theory*, Prentice Hall, New Jersey.
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business, Fourt Edition*, Kwan Men Yon (penerjemah), Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta.
- Suartana.I.W. 2010. *Akuntansi Keperilakuan Teori dan Implementasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Supriadi, D. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Suryadarma, D. 2008. Corruption, Public Spending, and Education Outcomes: Evidence from Indonesia, *Research School of Social Sciences*, The Australian National University, Australian.
- Suryadarma, D. 2011. How Corruption Diminishes the Effectiveness of Public Spending on Education in Indonesia, *Forthcoming in Bulletin of Indonesian Economic Studies*. ANU, Australia.
- Syamsudin. 2009. *Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Hasil Belajar Melalui Mutu Proses Belajar Mengajar Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Asahan*, Tesis Pasca Sarjana USU Medan.
- Tan, P.J., dan A. Mingat. 1992. "Education In Asia: A Comparative Study Of Cost And Financing". *World Bank, Human Development Department, Education Group*, Washington, D.C.
- Tan, P.J., dan A. Mingat. 1998. The Mechanics Of Progress In Education: Evidence From Cross-Country Data, *Policy Research Working Paper 2015*, Human Development Department, Education Group, World Bank, Washington, D.C.
- The Indonesia Local Education Governance Indeks (ILEGI), A Report Card of 50 Local Governments, Governance Matter to Education Outcomes, www-wds.worldbank.org, diunduh bulan Maret 2012.
- TIMMS. 2009. *Highlights From TIMMS 2007*, US. Departement of Education.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diunduh dalam www.djlpe.esdm.go.id, bulan Mei 2012.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diunduh dalam www.djlpe.esdm.go.id, bulan Mei 2012.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diunduh dalam www.dmo.or.id bulan Mei 2012.
- UNDP. 2000. Human Development Indeks 1999, diunduh dalam hdr.undp.org/en/statistics, bulan Maret 2012
- UNDP. 2008. Human Development Report 2008, diunduh dalam hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008, bulan Maret 2012.
- UNDP. 2009. Human Development Report 2009, diunduh dalam hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009, bulan Maret 2012.
- UNDP. 2011. *Human Development Report 2011*. diunduh dalam hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011, bulan Maret 2012.
- Wolf, A. 2004. *Does Education Matter?*, Penguin Books Ltd., London.
- World Bank. 2003. Making Services Work For Poor People, *World Development Report 2003*, World Bank, Washington, D.C.
- World Bank. 2011. *Bank Dunia dan Pendidikan di Indonesia*, diunduh melalui www.worldbank.org/id/education, tanggal 3 April 2012.
- www.tradingeconomics.com/indonesia. *Public Spending on Education*, Diakses tanggal 11 April 2012, 09:11 AM.
- www.kaltimpost.co.id. *BOS Kabupaten 2012 Naik 3 Miliar*, Diakses tanggal 25 Mei 2012, 07:35 AM.
- www.epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Educational_expenditure_statistics, *Public expenditure on education 2008*, UNESCO dan OECD diakses Agustus, 2012 jam 11.00. Wib.
- www.bulungankab.bps.go.id. *Statistik Daerah Kabupaten Bulungan 2011*, Diakses tanggal 30 Juli 2012, 04:40 AM.